

Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi Tahun 2020

Oleh

Dzikrina Asri dzikrinaasri@students.undip.ac.id , Dr. Drs. Muhammad Anan. MA adonan.sensei@gmail.com , Dr Dwi Erowati, S.Sos., M.Si dewi.erowati@live.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 memiliki tujuan mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam poin 5 (lima) membahas mengenai *Gender Equality*, yang berfokus dalam kesetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam berbagai aspek kehidupan. Tingginya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji implementasi program pemberdayaan perempuan yang ditetapkan oleh Kota Bekasi.

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut dikarenakan dengan metode penelitian ini peneliti dapat lebih mendalami proses dan fenomena yang terjadi di Kota Bekasi secara lebih detail karena dapat dilihat/dibandingkan hasil setiap tahunnya. Penelitian kualitatif yang diperoleh oleh peneliti disini melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (data laporan, wawancara, dan pengamatan pribadi). Selain itu, peneliti juga menggunakan teori manajemen pembangunan guna mengetahui tingkat pencapaian dari tujuan kebijakan, mengukur efisiensi kebijakan, mengatasi dampak kebijakan, dan memperoleh evaluasi untuk masukan kebijakan kedepannya.

Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa implementasi pemberdayaan gender di Kota Bekasi setiap tahunnya berjalan sesuai agenda dan telah memenuhi target serta tujuan dari program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang. Semakin meningkatnya peran dari *stakeholders* juga membantu pemerintah dalam menjalankan programnya walaupun masih terbatas pada beberapa aspek.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi pada tahun 2020 terlaksana dengan sangat baik melalui terlaksananya kegiatan dan tercapainya target pembangunan yang telah dirancang bila merujuk pada indikator sasaran berupa perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Sedangkan kendala dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan berasal dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Manajemen Pembangunan, Strategi Kebijakan.

Implementation of the Women's Empowerment Program in Bekasi City in 2020

Dzikrina Asri

14010116140099

Department Of Politics And Government

Faculty Of Social And Political Sciences Diponegoro University

ABSTRACT

The Sustainable Development Goals (SDGs) set by the United Nations in 2015 have the goal of encouraging social, economic, and environmental development. Point 5 (five) discusses Gender Equality, which focuses on equality between women and men in various aspects of life. The high disparity in development between men and women is the basis for researchers to study the implementation of the women's empowerment program set by the City of Bekasi.

The researcher uses a qualitative research type, the reason the researcher uses this research method because with this research method the researcher can further explore the processes and phenomena that occur in Bekasi City in more detail because the results can be seen/compared every year. Qualitative research obtained by researchers here involves the process of collecting and processing data from various empirical sources (data reports, interviews, and personal observations). In addition, researchers also use development management theory to determine the level of achievement of policy objectives, measure policy efficiency, determine the impact of policies, and obtain evaluations for future policy input.

The results of the research show that the implementation of gender empowerment in Bekasi City every year goes according to the agenda and has met the targets and objectives of the program. This can be seen from the increasing role of women in various fields. The increasing role of stakeholders also helps the government in carrying out its programs, although it is still limited to several aspects.

This study concludes that the implementation of the women's empowerment program in Bekasi City in 2020 has been carried out very well through the implementation of activities and the achievement of development targets that have been designed when referring to the target indicators in the form of obtaining the Anugerah Parahita Ekapraya (APE) award. Meanwhile, the obstacles to implementing the women's empowerment program stem from insufficient coordination between institutions and the low level of public understanding of the program.

Keywords: *Women's Empowerment, Development Management, Policy Strategy.*

A. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 yang didalamnya memiliki 17 poin bertujuan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs ini menetapkan beberapa hal yakni mengenai penyediaan pendidikan berkualitas, penyediaan air bersih dan sanitasi, pelestarian lingkungan, hingga kesetaraan gender yang tertuang dalam point ke lima.

Gender Equality berfokus dalam kesetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah berperan di barisan terdepan dalam pengidentifikasian dan penanganan kekerasan yang berpengaruh dalam menciptakan kesetaraan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang membahas mengenai Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi salah satu landasan operasional pembangunan. Dalam hal kesetaraan gender pemerintah memiliki peran pada barisan terdepan dalam mengidentifikasi dan melakukan penanganan kekerasan terhadap perilaku yang membahayakan perempuan. Dengan menciptakan perencanaan dan kebijakan guna mengatasi permasalahan mengenai ketidakadilan terhadap perempuan, dengan cara meningkatkan peran perempuan dalam lingkup negara (pemerintahan) dan bidang lainnya.

Kebijakan gender mainstreaming sebagai strategi pembangunan didifusikan secara tradisional sejak tahun 1975. Secara resmi pemerintah mengadopsi kebijakan ini melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 yang membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, di dalamnya membahas mengenai Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang merupakan salah satu landasan dalam pelaksanaan operasional pembangunan (RPJMN 2020 – 2024)

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015 Negara Indonesia berada pada peringkat 113 dari total 182 negara, IPM merupakan indikator dalam ketahanan hidup, pencapaian tingkat pendidikan, dan penghasilan. Namun sayangnya IPM tidak mengukur tingkat kesetaraan gender di suatu negara, untuk melihat tingkat kesetaraan gender sendiri dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dibuat untuk menunjukkan angka ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup. Pada 2015 IPG Indonesia berada pada angka 0,972; nilai IPG yang

semakin tinggi berarti semakin tinggi pula kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di negara tersebut.

Dalam RPJMD Kota Bekasi yang berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan misi ke tiga yakni “Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya”. Serta melalui misi ke tiga Kota Bekasi yakni “Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya” menandakan Bekasi menjadikan kesetaraan sosial hal yang penting melalui ditetapkannya indikator seperti jumlah PKK aktif, posyandu aktif, dan tingkat partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan.

Dari uraian singkat tentang pemberdayaan perempuan ini, penulis tertarik untuk melihat secara lebih mendalam program-program yang direncanakan dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi di bidang pemberdayaan perempuan, dan diberi judul “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi Tahun 2020”.

B. KERANGKA TEORITIS

1. Manajemen Pembangunan

Manajemen pembangunan adalah proses yang melibatkan pengarahan kelompok untuk pengelolaan upaya pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan merupakan salah satu konsep yang memiliki hubungan sangat dekat dengan pengelolaan pembangunan bangsa. Menurut Budiman (2000), secara umum istilah pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Pembangunan secara umum diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam bidang ekonomi.

Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen pembangunan nasional adalah pengelolaan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, menuju ke arah perwujudan cita-cita bangsa. Konsep manajemen pembangunan adalah satu perspektif dan cara lain untuk mengatakannya, karena melihat peran manajemen dalam mencapai pembangunan.

Sebagaimana fungsi manajemen pembangunan itu sendiri yang memiliki beberapa tahapan manajerial yang mengacu pada hal berikut:

- a. *Planning*, perencanaan berkaitan dengan perumusan tindakan yang akan dilaksanakan. Perencanaan diperlukan untuk memastikan pemanfaatan yang tepat

- dari sumber daya manusia dan non-manusia.
- b. *Organizing*, merupakan proses pengorganisasian yang melibatkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, penugasan kegiatan, dan pendeklarasian wewenang
 - c. *Staffing*, berfokus pada penempatan sumber daya manusia di tempat yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya.
 - d. *Motivating*, pemberian semangat, inspirasi, maupun dorongan dengan tujuan untuk mengarahkan ke arah tujuan.
 - e. *Controlling*, melakukan pengukuran kinerja terhadap tujuan pelaksanaan, menentukan penyebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika perlu.
 - f. Evaluasi pembangunan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif yang evaluatif digunakan untuk mengetahui output dari suatu kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang sebelumnya, dengan tujuan akhir adalah menentukan kebijakan berikutnya.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi program adalah suatu prosedur kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan program.

Dalam buku karangan AG. Subarsono (2012: 120 – 121), evaluasi program memiliki tujuan:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Bila dilihat dari tujuan evaluasi pembangunan maka dapat dikatakan bahwa evaluasi pembangunan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui output dari suatu kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang sebelumnya, dengan tujuan akhir adalah menentukan kebijakan selanjutnya yang menjadi perbaikan.

3. Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Dalam konsep pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya (energi) manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan (*competency*), kepercayaan (*confidence*), wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja (*performance*) sebagaimana diharapkan (Hasan Bisri, 2000). Pemberdayaan perempuan merupakan bentuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Sejatinya, peran perempuan dalam partisipasi pembangunan merupakan tindakan peningkatan harkat dan martabat perempuan itu sendiri.

Pemberdayaan perempuan merupakan bentuk upaya menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Peran pemberdayaan perempuan merupakan komitmen nasional dalam peningkatan status, posisi, dan kondisi dari setiap perempuan dalam mencapai kemajuan yang setara dengan laki – laki. Dewasa ini sudah ada perempuan yang menjadi Presiden, Gubernur, Menteri, Bupati, Camat, dan lain-lain. Hal tersebut menegaskan perempuan memiliki multi peran dalam masyarakat bukan hanya berperan ganda.

Melibatkan perempuan dalam proses pembangunan bukan sekadar tindakan dari perspektif humanistik. Sejatinya, peran perempuan dalam bidang partisipasi dalam pembangunan merupakan tindakan peningkatan harkat dan martabat perempuan itu sendiri.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, pemilihan metode ini dikarenakan topik yang diangkat oleh peneliti membahas mengenai implementasi program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi pada tahun 2020. Peneliti menggunakan beberapa sumber data yakni wawancara, catatan, pengamatan pribadi, dan studi literasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menguraikan situasi pada saat penelitian dengan mengkaji fenomena yang muncul dari situasi tersebut. Studi deskriptif juga dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi kualitatif untuk memberikan gambaran yang lengkap dan akurat.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020 yang sesuai dengan misi ke 4 dimana memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas. Dalam pelaksanaan program di Kota Bekasi terdapat beberapa proses yakni:

- a. Membuat data pilah gender;
- b. Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG);
- c. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap organisasi wanita;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan bagi perempuan pelaku usaha;
- e. Pelaksanaan kegiatan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta);
- f. Pengembangan PKK;
- g. Pembinaan terhadap P2WKSS;
- h. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- i. dan Memberikan kegiatan pembinaan terhadap kader Posyandu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam menjalankan agenda kebijakannya tentu memerlukan kelompok lain untuk ikut berperan baik secara langsung maupun tidak langsung guna memaksimalkan hasil yang didapatkan. Berikut ini adalah beberapa kelompok maupun organisasi tersebut:

- a. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), merupakan mitra kerja pemerintah Kota Bekasi yang memiliki peran sebagai fasilitator, merencanakan program, dan pelaksanaan program yang secara langsung maupun

tidak langsung ikut mensukseskan program dari pemerintah. Di Kota Bekasi sendiri beberapa pegawai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) juga merupakan pengurus dari TP PKK, sehingga hal ini tentu saja dapat mempermudah komunikasi antara pemerintah dengan TP PKK itu sendiri.

- b. Melalui program Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
 - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi
 - Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD)
 - Persatuan Istri Tentara (PERSIT)
 - Persatuan Istri Polisi (Bhayangkara)
 - Dharma Wanita Persatuan (DWP)
- c. Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Kegiatan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mengedepankan *responsive gender*.
- d. Kelompok Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), tersebar di seluruh kecamatan Kota Bekasi dengan total hingga saat ini berjumlah 60 kelompok yang masing – masing kelompok memiliki jenis pelatihan yang berbeda.
- e. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) juga bekerjasama dengan UMKM dalam pelaksanaan pelatihan bagi perempuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 80 Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menetapkan pagu Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 5.757.432.487.561,00. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi tahun 2018-2023, DPPPA Kota Bekasi mengalokasikan anggaran yang didapatkan untuk penggunaan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.390.509.800,00. Sedangkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 dalam Program pemberdayaan perempuan

sendiri setiap program/kegiatan memperoleh besaran pendanaannya sendiri. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Perempuan

No	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Kegiatan TP PKK	APBD	165.216.000,- -	90.806.000,-	98.33
2	Pembinaan Organisasi Perempuan	APBD	23.820.000,-	14.800.000,-	62.13
3	Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya	APBD	71.640.000,-	71.640.000,-	100
4	Fasilitas Program P2WKSS	DID	400.000.000,- -	378.754.000,- -	94.69
Jumlah			660.676.000,- -	556.000.000,- -	84

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPPPA Kota Bekasi Tahun 2020

2. Capaian Kota Bekasi

Dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Kementerian maupun Lembaga Negara melalui pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan suatu bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pemimpin kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Pemerintah Kota Bekasi tercatat mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sejak tahun 2016 dengan predikat pratama, tahun 2018 dengan predikat pratama, dan 2021 dengan predikat madya. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terbagi menjadi 4 kategori yang masing-masing memiliki standar tersendiri. Empat kategori tersebut adalah:

a. Kategori Pratama

Ketersediaan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG); komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumber daya manusia, alat analisis gender (*Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budgeting Statement (GBS)*), data gender atau data terpilah, dan partisipasi masyarakat.

b. Kategori Madya

- Ketersediaan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG); komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumber daya manusia, alat analisis gender (*Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budgeting Statement (GBS)*), data gender atau data terpilah, dan partisipasi masyarakat.
- Berjalannya Sebagian besar unit/SKPD/LM.

c. Kategori Utama

- Berjalan dengan baik secara terus menerus dan telah melembaga 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG); komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumber daya manusia, alat analisis gender (*Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budgeting Statement (GBS)*), data gender atau data terpilah, dan partisipasi masyarakat.
- Telah membentuk suatu sistem
- Menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Dampak kebijakan, kegiatan, dan program dapat dirasakan.

d. Kategori Mentor

Telah tercipta sebuah inovasi guna mempercepat pencapaian tujuan dari Pengarusutamaan Gender (PUG).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan 4 faktor penghambat dan 3 faktor pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi.

Faktor Penghambat

- a. Rendahnya kesadaran perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam lembaga legislatif;
- b. Tingkat persaingan yang ketat dengan calon legislatif pria;
- c. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pada lembaga dalam menjalankan program;
- d. dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

Faktor Pendukung

- a. Terdapat peningkatan pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik;
- b. Adanya dukungan dari stakeholders dan pihak lain;
- c. Mulai terdapat kegiatan kerja sama dengan kelompok luar dalam pelaksanaan kegiatan, seperti: perusahaan, universitas, sekolah, dan organisasi perempuan.

4. Solusi

Setiap pelaksanaan suatu program pastilah ada hambatan saat pelaksanaan yang dialami, begitu pula pada proses pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi, namun hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menjadikan Kota Bekasi memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kembali pada tingkat yang lebih tinggi pada tahun 2020. Solusi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan adalah:

- a. Berfokus terhadap pemberian pelatihan dan sosialisasi. DPPPA Kota Bekasi sendiri belajar dari evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya dalam mengatasi dan mempersiapkan hambatan yang mungkin terjadi.
- b. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat Kota Bekasi mengenai keuntungan mengikuti kegiatan pelatihan dan binaan dalam program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perekonomian.
- c. Selain berasal dari dana pemerintah daerah Kota Bekasi (APBD dan DID), dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan juga melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, seperti I Wash Used, Pegadaian, Go-Jek, dan sebagainya. Sehingga beberapa program mendapatkan anggaran tambahan yang diberikan oleh pihak swasta sehingga seluruh program dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis tentang implementasi program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi pada tahun 2020, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kendala pelaksanaan seperti berikut:

- a. Berdasarkan data Perempuan di Kota Bekasi memiliki kesadaran yang rendah untuk berpartisipasi pada lembaga legislatif, kurangnya keterwakilan perempuan mempengaruhi pembuatan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan isu responsif gender
- b. Tingkat persaingan yang ketat dengan calon legislatif pria;
- c. Kurangnya komunikasi antar lembaga sehingga mengakibatkan buruknya pelaksanaan akibat koordinasi dan sinkronisasi terhadap program yang tidak sejalan;
- d. dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Kota Bekasi dalam mengatasi kendala tersebut adalah:

- a. Belajar dari evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat mempersiapkan skenario yang dapat menyesuaikan dengan keadaan.
- b. Masyarakat diberikan gambaran dan pemahaman mengenai manfaat yang akan mereka dapatkan dengan mengikuti program-program pemberdayaan.
- c. Mempersiapkan setiap program dengan matang.
- d. Adanya keterlibatan pihak swasta dan SKPD lain.

F. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Bekasi

Perlu ada perhatian lebih terhadap perempuan yang telah mengikuti kegiatan pelatihan; Pemerintah harus dapat menghidupkan kelompok PEKKA dan PKK agar dapat berperan lebih di daerah yang telah terbentuk maupun belum ada kelompok tersebut; Pemerintah perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi perempuan usia muda pentingnya peran Wanita dalam bangku legislatif; pemerintah dapat menciptakan inovasi lebih guna meningkatkan peran kader perempuan dalam ranah legislatif; dan Pemerintah dapat menciptakan kebijakan, kegiatan, dan program yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih nyata.

2. Kepada Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat mendukung program pemerintah dengan cara ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah; Perempuan diharapkan dapat berpandangan bahwa mereka memiliki kebebasan dan posisi yang setara terhadap laki-laki baik dalam ranah public; Kesadaran perempuan untuk mau ikut berpartisipasi dalam ranah legislatif di Kota Bekasi; Diharapkan masyarakat dapat mengembangkan jiwa wirausaha ekonomi berbasis industri rumahan yang telah banyak diberikan pelatihan oleh pemerintah Kota Bekasi.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (2021) *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020*
- Pemerintah Kota Bekasi (2020) *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2020*
- Rakhmat. (2013). *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023*.
- Teguh Sulistyani. Dra Ambar. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah, UCLG (United Cities and Local Governments)*
<https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf> diakses pada 21 Mei 2019 pukul 20.35 WIB
- Kartasmita, Ginandjar. (1995). *Manajemen Pembangunan Nasional (Tinjauan Strategis Atas Upaya Bangsa Indonesia Dalam mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera)*. Ciamis
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.